

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR ANTRI KOTA CIMAHI

Lisdanur Ulfaida¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Toto Kushartono³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya fenomena masalah pada pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi dalam *Collaborative Governance*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik Analisis data melalui analisis selama di lapangan, dan analisis setelah di lapangan dengan tahapan pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya berdasarkan teori kolaborasi menurut Deseve (dalam Sudarmo, 2012:106) meliputi; 1) adanya saling percaya antara partisipan, 2) pembagian akuntabilitas, 3) berbagi informasi.

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi menunjukkan bahwa berdasarkan adanya saling percaya antara partisipan yaitu kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada pembagian pembagian akuntabilitas yaitu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum cukup untuk membuat kolaborasi lebih efektif, karena hanya sebagian dari stakeholder yang mengubah pola pikirnya. Dan berbagi informasi yaitu komunikasi yang terjalin masih kurang dan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Sampah

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of problems in waste management in the Cimahi City Antri Market in Collaborative Governance. The purpose of this study was to describe and find out the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of Collaborative Governance in waste management at Antri Market, Cimahi City. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques

through literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through analysis during the field, and analysis after the field with the stages of data collection can be done by observation, interviews, documentation, and a combination of the three based on collaboration theory according to Deseve (in Sudarmo, 2012: 106) include; 1) mutual trust between participants, 2) sharing accountability, 3) sharing information. The results of the study can be concluded that Collaborative Governance in waste management in Antri Market, Cimahi City shows that based on the existence of mutual trust between participants, namely trust in the government is still lacking because communication is not going well. Then on the distribution of accountability sharing, which is running in accordance with existing regulations, but not enough to make collaboration more effective, because only some of the stakeholders have changed their mindset. And information sharing, where communication is still lacking and there is a delay in information obtained by the community.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Waste

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah telah diberlakukan sejak tahun 2008 yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka dari itu pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Salah satu tempat yang banyak menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan dalam kegiatannya menghasilkan sampah yang memerlukan pengelolaan yang baik dan benar. Sampah yang bersumber dari aktivitas di pasar jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai macam pencemaran lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pedagang, pembeli dan masyarakat yang ada di sekitar pasar terutama hal ini dapat dilihat pada Pasar Antri Kota Cimahi. Kurangnya kolaborasi dari pihak pengelola sampah di Pasar Antri dengan Dinas

Lingkungan Hidup dalam upaya penanganan sampah membuat pengelolaan sampah di Pasar Antri terbengkalai. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang menimbulkan permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah Kota Cimahi khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan

keikutsertaan dari pedagang maupun pembeli yang ada di pasar tersebut. Hal ini terlihat berdasarkan jumlah sampah pada pengelola Pasar Antri Kota Cimahi pada tahun 2024 sebanyak 3ton/hari sedangkan jumlah penumpukan sampah sebanyak 160 ton/hari. Berdasarkan hasil observasi awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Antri Kota Cimahi, banyak masyarakat baik pedagang maupun pengunjung pasar yang tidak mau berkomentar perihal tumpukan sampah tersebut dikarenakan terlalu seringnya keluhan yang dilontarkan tetapi kurang ditanggapi oleh petugas yang bertanggungjawab.

Untuk menciptakan kenyamanan, kebersihan di pasar dibutuhkan *Collaborative Governance* dalam suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif agar mampu mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Hanya dengan mewujudkan suatu sistem yang baik belum cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan, peran aktif dari pengelola kebersihan serta kesadaran dari para pedagang, pengunjung dan penduduk di sekitar pasar untuk menjaga kebersihan khususnya di lingkungan pasar sangat dibutuhkan. Menurut Sambodo (2016) *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemegang kepentingan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara keseluruhan dan

dengan memodelkan secara verbal dan linguistik, dalam konteks yang alami. Dan menggunakan metode naturalistik yang berbeda (Moleong, 2008:6). Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alami yang menggambarkan masalah sosial seseorang dari perspektif perilaku. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis fenomena tersebut dalam suatu hasil analisis penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi dengan teknik yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Pengawas Pasar Antri Cimahi, Penanggungjawab Kebersihan Pasar Antri Cimahi, Petugas Kebersihan Pasar Antri Cimahi, Pedagang di Pasar Antri Cimahi dan Pembeli di Pasar Antri Cimahi.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance merupakan suatu jenis Governance yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non-state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif dan implementasi sehingga dapat mewujudkan suatu perubahan kearah yang lebih baik. Dengan hal ini, untuk mendalami mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi, peneliti menggunakan teori kolaborasi Deseve (dalam Sudarmo, 2012:106) yang menjadikan tahapan dalam melakukan penelitian dengan memperhatikan 3 tahapan diantaranya sebagai berikut.

***Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi**

1) Adanya saling percaya antara partisipan

Dalam *Collaborative Governance* antara stakeholder saling

menjaga kepercayaan satu sama lain. *Collaborative governance* mulai dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi bahwa pengelolaan sampah belum maksimal karena masih ada ketidakpercayaan antara stakeholders. Akan tetapi, dengan adanya Bank Sampah Pusat sangat membantu pemerintah dalam penanganan sampah dan pengelolaan sampah. Hal ini didukung dengan sebuah kolaborasi diperlukan kepercayaan dari para *stakeholder*, hal ini berkaitan dengan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, PT Swasta dan masyarakat yang diantaranya adalah pemulung, pemasok sampah dan nasabah, harus ada rasa saling percaya satu sama lain. Namun, dalam realitanya masyarakat sendiri kurang percaya pada pihak UPTD. Daur Ulang Sampah dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebabkan tidak hanya saja dengan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetapi juga membuat inovasi tersebut tidak maksimal

2) Pembagian akuntabilitas

Dalam kolaborasi program pengelolaan sampah, prosedur pelaksanaan (SOP) sudah ditentukan oleh pemerintah tetapi peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Pembagian akuntabilitas dalam proses kolaborasi program pengelolaan sampah terlibat dari pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing stakeholder. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Swasta bertanggung jawab mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pengelolaan sampah, lain halnya masyarakat yang bertugas sebagai penerima dan yang menjalankan setiap kegiatan menjadi lancar. Namun, Selama program pengelolaan sampah

ini berlangsung, ketersediaan sumber daya manusia sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan sumber dana juga sudah terpenuhi dengan adanya anggaran APBD yang diberikan oleh pemerintah untuk UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah lain halnya dari swasta sendiri. Dalam kerjasama pengelolaan sampah yang boleh terlibat didalamnya yaitu pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah), Swasta, masyarakat dalam hal ini yang telah menjadi nasabah dari bank sampah, dan pengepul sampah hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

3) **Berbagi informasi**

Dalam kolaborasi seluruh stakeholder memilah-milah informasi yang diberikan kepada masyarakat, karena perlindungan *privacy* setiap stakeholder adalah hak dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi. Seluruh stakeholder hanya memberikan informasi penting kepada sesama stakeholder. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk informasi bahwa pengelolaan sampah itu memang ada. Pemerintah kota yang memberikan tugas kepada kecamatan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah yang dibantu oleh UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah jika dibutuhkan. Informasi yang ingin didapatkan yang dulunya harus ke Dinas Lingkungan Hidup, sekarang pelayanannya telah ada di Kecamatan. Dengan hal ini, pemerintah menggunakan sosial media untuk bertukar informasi dengan masyarakat atau dengan pihak swasta dan sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bank sampah. Namun, pemerintah masih kurang penanganannya, hal tersebut pula yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat ke pihak pemerintah. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat berbanding terbalik dengan masalah informasi, karena kurangnya kesadaran dari pemerintah bahwa ketika terdapat informasi yang harus diberikan kepada

masyarakat harus segera disampaikan, sedangkan untuk pemerintah dengan pihak swasta jalinan informasinya berjalan dengan baik dengan adanya pertemuan yang selalu dilakukan. Untuk pihak swasta dengan masyarakat sendiri pun hubungannya berjalan dengan baik karena swasta memberikan wadah kepada masyarakat untuk belajar mengenai sampah dan swasta sendiri membangun warung atau tempat berkumpul para nasabah, pengepul dan lainnya untuk bercengkrama dan saling bertukar pikir satu sama lainnya.

Faktor Pendukung *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi

1) Sumber daya

Faktor yang mendukung dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan kolaborasi. Sumber daya manusia yang berperan dalam kolaborasi ini sudah memiliki kompetensi di bidang masing-masing sehingga mereka tahu apa yang seharusnya dikerjakan dan sesuai peran masing-masing sedangkan untuk sumber daya keuangan sudah disediakan dari anggaran APBD dan dibantu oleh Swasta dalam hal fasilitas yang dibutuhkan.

2) Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan faktor yang mendukung kolaborasi. Dengan adanya otoritas atau kewenangan dalam kolaborasi antara stakeholder, maka stakeholder lainnya bisa menjalankan tugas sesuai peran masing-masing mengikuti SOP yang ada. Pemerintah, swasta dengan masyarakat bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Sesuai dengan hasil pengamatan penulis bahwa mereka itu bekerja sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh pemerintah.

3) Komitmen yang kuat

Komitmen merupakan faktor penting dalam kolaborasi. Tanpa adanya komitmen dari masing-masing stakeholder, kolaborasi tidak akan bisa berjalan dan tidak bisa mencapai tujuan kolaborasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan program Bank Sampah antara stakeholder menjaga kepercayaan satu sama lain. Pemerintah menjaga kepercayaan dari pihak swasta dan masyarakat dengan menjalankan Standar Operasional Prosedurnya masing-masing. Pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat), komitmen dari masing-masing stakeholder sangat kuat sehingga kolaborasi dalam penaksanaan inovasi berjalan dengan baik.

aktor Penghambat Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi

1) Kurang kepercayaan

Dalam kolaborasi dibutuhkan kepercayaan antara stakeholder tapi dalam kolaborasi pengelolaan sampah ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih kurang. Pandangan Kepala Pengeloaan Pasar Antri yang tidak percaya sepenuhnya kepada UPTD. Pengelolaan Bank Sampah Pusat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah agar kepercayaan dari masyarakat tidak berkurang. Kurangnya kepercayaan tersebut mengakibatkan kolaborasi dan kegiatan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, sebaliknya hanya akan menjatuhkan satu sama lainnya.

2) Keterbatasan informasi

Informasi yang didapatkan oleh stakeholder masing kurang. Pemerintah masih kurang masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bak sampah itu sendiri. Antara pemerintah dan masyarakat berbanding terbalik dengan masalah informasi, karena kurangnya kesadaran dari pemerintah bahwa ketika terdapat informasi yang harus diberikan kepada masyarakat

harus segera disampaikan, sedangkan untuk pemerintah dengan pihak swasta jalinan informasinya. Tidak semua stakeholder mengakses informasi secara mudah. Informasi akan mudah di dapat apabila ada unsur kedekatan dengan stakeholder lain atau diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mencari informasi yang diperlukan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasarkan hasil mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi, maka secara keseluruhan dalam penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Pasar Antri Kota Cimahi yakni; pertama adanya saling percaya antara partisipan dilakukannya belum *colaborative* karena masih adanya kurang percaya antar pihak *stakeholders*, pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal ini dapat terlihat jelas dengan adanya program pemerinhah yang belum terlaksana. Kedua, pembagian akuntabilitas ini tercantum pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Ketiga, berbagi informasi ini tidak berjalan secara semestinya antara *stakeholders* dengan pihak lainnya. Kemudian dalam faktor pendukung dilihat dari SDM dan SDK yang memadai dan adanya sebuah komitmen/ otoritas yang kuat sedangkan dalam faktor penghambat dilihat dari sebuah adanya kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Andrik. 2009. Kajian Pembiayaan Sampah dalam Mendukung Pengelolaan Sampah di Pasar Johar Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Harimurti, S. M., Rahayu, E. D., Yuriandala, Y., Koeswandana, N. A., Sugiyanto, R. A. L., Perdana, M. P. G. P., ... & Sari, C. G. (2020). Pengolahan Sampah Anorganik: Pengabdian Masyarakat Mahasiswa pada Era Tatanan Kehidupan Baru. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 565-572.
- Harapan, K., & Tarakan, K. (2019). Implementasi Pengelolaan Sampah. Lucky Radita Alma, S. M. (2019). Peningkatan Quality Of Life Pekerja Pemungut Dan Pemilah Sampah Pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu *Reduce Reuse Recycle* (TPST3R) Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang. Malang: Media Nusa Creative.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98.
- Rahayu, D. E., & Sukmono, Y. (2013). Kajian potensi pemanfaatan sampah organik pasar berdasarkan karakteristiknya (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda). *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 5(2), 77-90.
- Syam, R. (2018). Pengelolaan Sampah di Pasar Terong Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Saleh, C. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1.
- Widodo, T. (2013). Studi tentang peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 1(1), 1-11.
- Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

